

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara besar yang memiliki banyak pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Hasil pendataan pada tahun 2010 oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rapubumi terdapat 13.487 pulau di Indonesia yang selanjutnya diakui oleh PBB.¹ Masing-masing pulau besar, seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTT, NTB, Maluku, dan Papua terdiri dari beberapa provinsi yang di dalamnya terdapat bermacam-macam etnik. Di Indonesia sendiri terdapat lebih dari 1.300 suku bangsa yang kemudian menjadikan Indonesia sebagai Negara yang kaya akan keberagaman.² Masing-masing etnik memiliki budaya yang didalamnya terdapat bahasa, agama, seni, dan adat istiadat yang berbeda-beda satu sama lain.

Keberagaman budaya di Indonesia ini menjadikan adanya slogan persatuan budaya yang dikenal dengan “Bhinneka Tunggal Ika” yang berarti berbeda-beda namun tetap satu jua. Namun nyatanya keberagaman tersebut tidak jarang dapat menimbulkan beberapa masalah, seperti stereotip gender, rasisme, diskriminasi dan lain

¹ Dody Usodo Hargo, *Jumlah Pulau di Indonesia* (Jakarta: <http://www.dkn.go.id>, 2014)

² Akhsan Na'im dan Hendry Syaputra, *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2010), hal. 5.

sebagainya. Berdasarkan data dari Kementrian Dalam Negeri, jumlah konflik sosial pada tahun 2007 terjadi sebanyak 93 kasus, kemudian menurun pada tahun 2011 menjadi 77 kasus namun pada tahun 2012 meningkat menjadi 89 kasus hingga akhir bulan Agustus.³ Menimbang dari terjadinya beberapa konflik tersebut, maka diperlukan suatu upaya yang dapat membentuk karakter masyarakat yang mampu memiliki toleransi yang tinggi terhadap segala perbedaan yang ada di Indonesia sedini mungkin. Upaya tersebut salah satunya melalui lembaga pendidikan formal di sekolah.

Pendidikan yang dimaksud pada paragraf di atas adalah pendidikan berbasis multikultural. James Banks memandang pendidikan multikultural sebagai kegiatan yang ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai suatu anugerah Tuhan. Secara luas, pendidikan multikultural mencakup seluruh siswa tanpa membedakan kelompok-kelompoknya, seperti gender, etnik, ras, budaya, strata sosial dan agama.⁴ Hal ini sesuai dengan keadaan pendidikan yang memang perlu diterapkan di Indonesia sebagai negara multikultural guna memberikan sikap terbuka terhadap perbedaan.

Upaya untuk mewujudkan pendidikan yang berbasis multikultural tersebut diperlukan peran guru di dalamnya. Guru sebagai komponen

³ Heru Nurrohman. "Program Bimbingan dan Konseling Berbasis Nilai-Nilai Budaya Untuk menyesuaikan Kemampuan Penyesuaian Diri Peserta Didik di SMAN Kota Palangkaraya", Skripsi UPI, 2013, hal. 4.

⁴ Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 175

terpenting di dalam kesatuan pendidikan tidak hanya berkewajiban memberikan informasi berupa ilmu pengetahuan dan wawasan saja akan tetapi penting pula untuk membentuk karakter kepribadian peserta didik. Sesuai yang tertera dalam UU RI Nomor 14 Tahun 2005 BAB II Pasal 6 yang menjelaskan bahwa kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional adalah melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Pembentukan karakter peserta didik yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional tidak lepas dari pengaruh perilaku yang ditampilkan guru setiap harinya di sekolah saat berhadapan dengan peserta didik. Oleh karena itu dalam konteks merealisasikan pendidikan berbasis multikultural di Indonesia, maka guru perlu memiliki kompetensi lebih pada aspek sosial sebagaimana yang telah tertera dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, pasal 10 ayat 1 tentang guru dan dosen. Dijelaskan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kompetensi sosial ini menjelaskan bahwa guru harus mampu

berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, dengan bertindak secara objektif, dan tidak diskriminasi karena perbedaan jenis kelamin, ras, agama, latar belakang keluarga, dan latar belakang status sosial. Tujuan dari standar kompetensi sosial guru yang telah disebutkan yakni agar terciptanya proses pembelajaran yang penuh dengan kepedulian dan kesadaran akan perbedaan budaya yang ada di sekolah, sehingga tidak terjadinya bias budaya terhadap peserta didik dari latar belakang sosial budaya yang berbeda.

Hal tersebut dikhususkan bagi guru Bimbingan dan Konseling (BK) yang tidak hanya fokus pada pengembangan aspek belajar peserta didik saja layaknya yang dilakukan guru mata pelajaran inti di sekolah, namun juga ada 3 aspek lainnya dalam diri peserta didik yang harus dikembangkan yakni pribadi, sosial, dan karir. Keempat aspek tersebut mengharuskan guru BK memiliki tuntutan lebih kepada peserta didik untuk memperhatikan tumbuh kembang mereka. Sesuai yang dikatakan oleh Muro dan Kottman bahwa bimbingan dan konseling diperlukan oleh siswa karena siswa harus memperoleh pemahaman diri, meningkatkan tanggung jawab terhadap kontrol diri, memiliki kematangan dalam memahami lingkungan, dan belajar membuat keputusan.⁵ Terlebih lagi bagi peserta didik yang sudah mulai memasuki masa remaja, karena

⁵ Ahman. *Bimbingan dan Konseling Berbasis Kompetensi: Orientasi Dasar Pengembangan Profesi Konselor* (rev.ed.,; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 31-32

Supriatna mengatakan pada umumnya perubahan-perubahan yang sangat cepat dapat menimbulkan goncangan-goncangan dalam kehidupan emosi remaja.⁶ Hal ini menandakan pentingnya peran guru BK dalam membimbing siswa yang memasuki masa remaja.

Istilah remaja telah digunakan secara luas untuk menunjukkan suatu tahap perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa, yang ditandai oleh perubahan-perubahan fisik umum serta perkembangan kognitif dan sosial.⁷ Perubahan-perubahan tersebut menjadi suatu masa yang sulit bagi seorang remaja terutama remaja yang masuk dalam rentang usia 12-15 tahun atau yang disebut dengan remaja awal. Remaja pada usia tersebut pada umumnya merupakan remaja yang sudah memasuki Sekolah Menengah Pertama (SMP). Eccles & Midgely dalam Santrock menjelaskan bahwa transisi dari SD ke SMP merupakan transisi yang dapat menimbulkan stres karena transisi berlangsung pada suatu masa ketika banyak perubahan pada diri individu, di dalam keluarga, maupun di sekolah yang berlangsung secara serentak, baik perubahan fisik dan kognisi sosial.⁸ Dapat disimpulkan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi secara serentak pada remaja SMP, baik fisik, kognitif, dan

⁶ Mamat Supriatna. *Bimbingan dan Konseling Berbasis Kompetensi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) hal.72

⁷ Desmita. *Psikologi Perkembangan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hal.190

⁸ Santrock. *Life-Span Development: Perkembangan Masa Hidup* (rev. ed.; Jakarta: Erlangga, 2002) hal.

sosial dapat menimbulkan bermacam stres yang mengakibatkan mulai munculnya masalah.

Dengan demikian, guna membantu dan membimbing peserta didik menghadapi berbagai permasalahannya pada fase remaja ini, peran guru BK sangat dibutuhkan melalui kegiatan konseling. Konseling menurut *Division of Counseling Psychology* adalah suatu proses membantu individu untuk mengatasi hambatan-hambatan perkembangan dirinya, dan untuk mencapai perkembangan optimal kemampuan pribadi yang dimilikinya, proses tersebut dapat terjadi setiap waktu.⁹ Oleh karena itu kegiatan konseling ini bersifat pribadi dan rahasia antara konseli dan konselor dengan tujuan membantu konseli mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi selama proses perkembangannya.

Dalam melaksanakan kegiatan konseling tersebut, guru BK akan bertemu dengan konseli dari berbagai latar belakang sosial budaya yang berbeda. Perbedaan latar belakang budaya antara konselor dan konseli saat melakukan proses konseling ini disebut dengan konseling multikultural. Konseling multikultural itu sendiri menurut Baruth dan Manning yakni:

“professional intervention and counseling relationships in which counselor and the client belong to different cultural groups,

⁹ Prayitno & Erman Amti. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal.95

subscribe to different worldviews, and have distinguishing differences such as gender, sexual orientation, disabilities, social class, spirituality, and lifespan period.”¹⁰

Intervensi profesional dan hubungan konseling antara konselor dan klien yang berasal dari kelompok budaya yang berbeda, menganut pada pandangan yang berbeda, dan memiliki perbedaan yang membedakan, seperti gender, orientasi seksual, disabilitas, kelas sosial, spiritual, dan periode kehidupan. Dapat disimpulkan bahwa dalam proses konseling multikultural terdapat berbagai perbedaan dari berbagai aspek antara konselor/guru BK dan konseli. Perbedaan tersebut pada akhirnya menuntut guru BK untuk memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas terkait dengan latar belakang budaya konseli sebelum melakukan proses konseling lebih dalam. Pernyataan tersebut juga mengindikasikan latar belakang budaya konseli tidak hanya sebatas suku dan adat istiadat saja akan tetapi juga mencakup orientasi seksual, gender, spiritual, kelas sosial, dan lain sebagainya.

Kompetensi konseling multikultural bagi guru BK/konselor ini memiliki 3 dimensi utama sebagaimana yang telah disebutkan oleh Sue dan Sue, yakni

“First, a culturally skilled counselor is one who is actively in the process of becoming aware of his or her own assumption about human behavior, values, biases, perceived nations, personal

¹⁰ Leroy G. Baruth and M. Lee Manning, *Multicultural Counseling and Psychotherapy: A Lifespan Approach* (Upper Saddle River, New Jersey: Pearson, 2012), p. 17.

limitations, and so forth. Second, a culturally skilled counselor is one who actively attempts to understand the worldview of his or her culturally different client without negative judgments. Third, a culturally skilled counselor is one who is in the process of actively developing and practicing appropriate, relevant, and sensitive intervention strategies and skills in working with his or her culturally different clients.”¹¹

Pertama, seorang konselor yang memiliki kompetensi budaya adalah seseorang yang secara aktif dalam proses menjadi sadar terhadap asumsi pribadinya mengenai tingkah laku manusia, nilai-nilai, bias-bias, persepsi terhadap suatu bangsa, keterbatasan individu, dan lain sebagainya. Kedua, seorang konselor yang memiliki kompetensi budaya adalah seseorang yang secara aktif mengupayakan untuk memahami pandangan hidup dari kliennya yang berbeda budaya tanpa penilaian negatif. Ketiga, seorang konselor yang memiliki kompetensi budaya adalah seseorang yang dalam proses secara aktif membangun dan mempraktikkan kesesuaian, relevansi, dan sensitivitas strategi intervensi serta kemampuan bekerja dengan klien yang berbeda budaya dengannya. Dapat disimpulkan bahwa kompetensi konseling multikultural guru BK/konselor memiliki tiga karakteristik, diantaranya kesadaran diri konselor terhadap asumsi, nilai, dan bias pribadi, pengetahuan mengenai pandangan hidup konseli yang berbeda budaya, serta keterampilan dalam mengembangkan teknik intervensi. Ketiga karakteristik tersebut menjadi

¹¹ Wing, Sue. Arredondo & Mc.Davis, 1992, Articles Multicultural Counseling Competencies and Standards: A Call to the Profession, *Journal of Counseling & Development*, 70. 477-486, p. 481

kompetensi yang perlu dimiliki seorang guru BK/konselor, khususnya pada dimensi kesadaran diri. Karakteristik kesadaran diri ini menjadi awal penting yang harus dimiliki guru BK untuk selanjutnya guru BK memiliki keterampilan yang memadai dalam kompetensi konseling multikultural.

Sesuai yang dikatakan oleh Pederson bahwa:

“If awareness and knowledge are lacking, the trainee (counselor) will have a difficult time becoming skillful. If awareness is lacking, then wrong assumptions are likely,...”¹²

Jika kesadaran dan pengetahuan tidak memadai, seorang konselor akan memiliki waktu yang sulit untuk menjadi terampil. Jika kesadaran tidak cukup, maka kesalahan asumsi mungkin saja terjadi,...” Dengan kata lain jika seorang konselor pada tahap awal saja sudah memiliki asumsi yang salah terkait konseli yang berasal dari budaya lain, maka dikhawatirkan guru BK akan salah memberikan treatment kepada konseli yang berakibat pada konseli merasa permasalahannya tidak terselesaikan dan menyebabkan ia semakin tertekan, dan lain sebagainya.

Penerapan konseling multikultural di Indonesia dan kemampuan guru BK dalam hal tersebut pun di dukung oleh Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2008 serta Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) mengenai kompetensi budaya yang harus dimiliki oleh guru BK/konselor. Salah satunya masuk dalam subkompetensi yakni guru

¹² Paul. B. Pedersen, *Ethics, Competence, and Professional Issues in Cross-Cultural Counseling* (,2007), p.9

BK/konselor harus menguasai landasan budaya dengan indikator: (1) memahami ragam budaya yang dapat mempengaruhi perilaku individu dan kelompok, (2) memahami dan menunjukkan sikap penerimaan terhadap perbedaan sudut pandang subjektif antara konselor dengan klien, dan (3) peka, toleran, dan responsif terhadap perbedaan budaya klien. Sehingga hal tersebut menjadi hal penting dan juga dasar bagi guru BK untuk menerapkan konseling berbasis multikultural dalam kinerjanya.

Pentingnya guru BK memiliki kesadaran terhadap asumsi, nilai, dan bias pribadi saat konseling ini sangat dirasa terutama bagi guru BK yang bekerja di wilayah DKI Jakarta. Jakarta adalah kota yang ditempati oleh masyarakat heterogen dari berbagai daerah. Beragam masyarakat, beragam pula perilaku yang ditampilkan oleh masyarakat tersebut, maka semakin guru BK harus bisa menambah wawasannya mengenai perilaku dari berbagai etnis yang berbeda. Khususnya bagi guru BK di wilayah Jakarta Timur. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Tahun 2010, Jakarta Timur menempatkan posisi pertama sebagai wilayah dengan penduduk terbanyak, yakni sebesar 2.693.896 jiwa.¹³ Semakin padat penduduk di kota besar seperti Jakarta maka semakin beragam pula etnis yang ada di dalamnya. Hal inilah yang membuat guru BK di wilayah

¹³ Badan Pusat Statistik. *Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rumah tangga Provinsi DKI Jakarta Sampai Level Kelurahan*, (Jakarta: <http://jakarta.bps.go.id>, 2012)

Jakarta Timur perlu memiliki kompetensi konseling multikultural dalam menjalankan tugas keprofesionalannya.

Studi pendahuluan yang dilakukan kepada 5 guru BK di 3 SMP Negeri di Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur dapat dijelaskan bahwa 3 dari 5 guru BK tidak pernah mencari tahu terlebih dahulu mengenai latar belakang budaya, agama, serta status sosial ekonomi konseli saat melakukan proses konseling. Dua guru BK lainnya selalu mencari tahu terlebih dahulu latar belakang sosial ekonominya namun tidak mencari tahu latar belakang agama serta budayanya. Kemudian 2 dari 5 guru BK tidak mengetahui istilah, arti, dan perilaku rasis dan diskriminasi di sekolah, 3 guru BK lainnya mengetahui istilah, arti, dan perilaku tersebut di lingkungan sekolah. Selanjutnya kelima guru BK tersebut tidak pernah mengikuti seminar maupun membaca buku dan bertanya mengenai multikultural yang berguna untuk memperkaya pemahaman dan efektivitas mereka terhadap populasi yang berbeda budaya. Namun demikian keseluruhan guru BK merasa nyaman saja jika berhadapan dengan konseli yang berbeda budaya.

Jika dilihat dari uraian yang sudah dipaparkan di atas maka sudah saatnya guru BK di wilayah DKI Jakarta memiliki kompetensi konseling multikultural khususnya pada karakteristik kesadaran guru BK terhadap asumsi, nilai, dan bias pribadi. Apabila guru BK terlebih dahulu memiliki

karakteristik ini pada kompetensi konseling multikultural, maka akan tumbuh kepercayaan konseli kepada guru BK dan proses konseling berangsur-angsur akan semakin baik.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diungkapkan, maka timbul beberapa pertanyaan yang hendak diidentifikasi, diantaranya:

1. Apakah guru BK SMP Negeri di Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki kompetensi konseling multikultural pada karakteristik kesadaran guru BK terhadap asumsi, nilai, dan bias pribadi?
2. Apa saja faktor-faktor yang mendukung guru BK memiliki kompetensi konseling multikultural pada karakteristik kesadaran guru BK terhadap asumsi, nilai, dan bias pribadi?
3. Bagaimana gambaran kompetensi konseling multikultural guru BK SMP Negeri di Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur pada karakteristik kesadaran guru BK terhadap asumsi, nilai, dan bias pribadi?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan beberapa identifikasi masalah yang sudah disebutkan, maka dalam penelitian ini peneliti membatasi masalah pada poin kompetensi kompetensi konseling multikultural guru BK SMP Negeri di

Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur pada karakteristik kesadaran guru BK terhadap asumsi, nilai, dan bias.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana gambaran empirik kompetensi konseling multikultural guru BK SMP Negeri di Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur pada karakteristik kesadaran guru BK terhadap asumsi, nilai, dan bias pribadi?”

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi mengenai teori kompetensi konseling multikultural guru BK/konselor dari karakteristik kesadaran guru BK terhadap asumsi, nilai, dan bias pribadi.

2. Manfaat Praktik

a. Guru BK

Penelitian ini dapat menjadi pengetahuan serta masukan bagi guru BK untuk lebih sadar akan pentingnya kompetensi konseling multikultural terlebih pada karakteristik kesadaran terhadap asumsi, nilai, dan bias pribadi agar pelayanan konseling

yang diberikan guru BK kepada peserta didik dari berbagai etnis menjadi lebih optimal.

b. Civitas Akademika Jurusan Bimbingan dan Konseling UNJ

Manfaat dari hasil penelitian ini bagi civitas akademika jurusan BK UNJ dapat ditujukan bagi dua pihak. Pertama adalah mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan mengenai teori kompetensi konseling multikultural maupun hasil penelitian pada dimensi kesadarannya di kalangan guru BK SMP Negeri di wilayah 1 kota Administrasi Jakarta Timur. Kedua yakni bagi dosen dan pengurus jurusan BK sebagai bahan evaluasi dan masukan perihal keadaan yang sebenarnya terjadi di sekolah mengenai kompetensi konseling multikultural guru BK pada karakteristik terhadap asumsi, nilai, dan bias pribadi, sehingga dapat lebih optimal menciptakan calon guru BK yang berpotensi di bidang ini.

c. Pengurus Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK)

Setelah mengetahui pentingnya kesadaran multikultural di kalangan guru BK, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi serta dapat membuat kegiatan rutin untuk meningkatkan kompetensi konseling multikultural guru BK seperti mengadakan seminar atau kajian yang membahas isu multikultural serta pelatihan.

d. Peneliti dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi pihak-pihak yang telah disebutkan sebelumnya namun juga bagi peneliti sendiri. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta wawasan peneliti mengenai multikultural dalam ranah Bimbingan dan Konseling serta pentingnya hal tersebut dipelajari oleh calon guru BK/Konselor dan diterapkan bagi guru BK di sekolah. Kemudian bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan isu ini, dapat melanjutkan penelitian ini pada karakteristik lainnya yaitu mengembangkan strategi teknik intervensi yang sesuai.

